



MENGUKUR DAMPAK ANNUAL MEETINGS IMF-WB 2018 TERHADAP EKONOMI REGIONAL DAN NASIONAL

Tommy Avif Setiawan*

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, Tangerang Selatan

1401190233_tommyavif@pknstan.ac.id

I Gede Agus Ariutama

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, Tangerang Selatan

igedeagus@pknstan.ac.id

*Alamat Korespondensi: 1401190233_tommyavif@pknstan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to estimate the economic impact of Annual Meetings IMF-WB 2018 in Bali at the national and regional levels and to estimate the value added tax (VAT). This study utilizes secondary data, reports of monetary activities, expenditure surveys, and statistical data of the Central Statistics Agency. The IRIO model is exploited to determine the value of the economic impact on 17 business sectors in 34 provinces in Indonesia. This study found that the sector with the largest total impact was the accommodation and food service activities sector hotel, restaurant, meeting facilities and the construction sector in building infrastructure for the entire of activities. In addition, government spending on holding this event resulted in a significant economic growth impact not only in Bali as the host region, but also in the neighboring regions. In addition, organizing the event is estimated to increase state revenues, specifically VAT. The implications of this research are related to budget allocation in the implementation of international events, which can be used as input for evaluating government spending policies. In general, it can be concluded that the government of Indonesia was successful in carrying out activities because they produced an economic impact greater than the allocated expenditure.

Keywords: Economic Impact, IRIO Model, MICE, VAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak ekonomi penyelenggaraan *Annual Meetings* IMF-WB 2018 di Bali pada level nasional dan regional serta menganalisis estimasi pajak pertambahan nilai (PPN) dari dampak yang terjadi. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat moneter, survei pengeluaran, serta data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Model IRIO pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai dari dampak ekonomi pada 17 sektor lapangan usaha di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa sektor dengan total dampak terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, industri hotel, restoran, fasilitas pertemuan, dan sektor konstruksi sebagai infrastruktur penyelenggaraan rangkaian kegiatan. Selain itu, belanja pemerintah untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-WB 2018 menghasilkan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak hanya di Bali selaku daerah penyelenggara, tetapi juga wilayah sekitarnya. Selain itu, penyelenggaraan *event* tersebut juga diestimasikan meningkatkan penerimaan negara, khususnya PPN. Implikasi pada penelitian ini berkaitan dengan pengalokasian anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan internasional yaitu dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan pengeluaran pemerintah pada sektor dan wilayah terdampak. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia berhasil menyelenggarakan kegiatan karena menghasilkan dampak ekonomi lebih besar daripada pengeluaran yang dialokasikan.

Kata kunci: Dampak Ekonomi, MICE, Model IRIO, PPN

KLASIFIKASI JEL: E62, E63, H50

CARA MENGUTIP:

Setiawan, T. A. & Ariutama, I. G. A. (2023). Mengukur dampak annual meetings IMF-WB 2018 terhadap ekonomi regional dan nasional. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. 8(2). 137-147.

PENDAHULUAN

Meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) merupakan salah satu kegiatan yang didorong oleh pemerintah, industri, dan lembaga lainnya untuk menjadi salah satu pendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi (Jones & Li, 2015). Berdasarkan data *Union of International Associations* (UIA, 2019) terdapat 494.711 pertemuan internasional di lebih dari 250 negara dan 12.682 kota dalam periode tahun 1999 sampai dengan 2018. Ditinjau dari tren pertumbuhan dan persebaran penyelenggaraan *meetings*, terdapat peningkatan dari sisi jumlah kegiatan dan peserta yang menghadiri. Setiap tahun rata-rata jumlah *meetings* relatif stabil, kurang lebih 12.000 *meetings* setiap tahunnya. Terdapat juga pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah dan peserta pertemuan di Benua Asia. Setiap tahun kurang lebih jutaan orang di seluruh dunia menghadiri konvensi dan pameran, menyampaikan materi sosial, budaya, dan ekonomi yang memberikan dampak ekonomi maupun non ekonomi terhadap tuan rumah penyelenggara.

Jones & Li (2015) menyatakan bahwa terdapat tiga alasan MICE penting untuk dianalisis dampaknya. Pertama, terdapat asumsi dan beberapa bukti bahwa pengunjung bisnis memiliki pengeluaran yang lebih tinggi per hari dan/atau per perjalanan dibandingkan dengan pengunjung rekreasi. Kedua, terdapat relevansi erat antara peserta MICE dengan pemanfaatan fasilitas di daerah penyelenggara dimana periode kunjungan peserta MICE cenderung lebih lama daripada periode pengunjung rekreasi. Ketiga, pengembangan fasilitas pameran dan konferensi yang dimiliki sebuah kota atau negara dapat menawarkan daya tarik pengunjung dalam memperpanjang kunjungan melalui dukungan sektor penyelenggaraan MICE yang kuat, dengan manfaat tambahan bagi masyarakat, dan memungkinkan untuk tujuan lain yang lebih luas, seperti pariwisata. Menurut Prasetyo et al. (2021) perlu adanya evaluasi studi dampak ekonomi kebijakan penyelenggaraan kegiatan internasional bagi negara dan kota penyelenggara kegiatan dalam mempertimbangkan pengembalian investasi atas kebijakan terkait penyelenggaraan tersebut.

Pemerintah memiliki wewenang dalam mengalokasikan anggaran belanja pemerintah agar program pembangunan ekonomi berjalan optimal dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Safitri et al., 2021). Alokasi belanja pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan MICE mendorong belanja pengunjung MICE yang biasanya memiliki penghasilan tinggi dan waktu kunjungan lebih lama dari rata-rata pengunjung lainnya. Sehingga, dampak dari belanja pengunjung MICE tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah, pajak, pekerjaan dalam jangka pendek dan menghasilkan

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengambilan kebijakan dalam alokasi belanja pemerintah terkait penyelenggaraan kegiatan tertentu karena mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi positif pada wilayah dan sektor yang terdampak.
- Model IRIO dapat menjadi alat analisis evaluasi kebijakan studi dampak ekonomi atas penyelenggaraan kegiatan yang komprehensif dan akurat.
- Penelitian ini menunjukkan bahwa dapat dihitung estimasi pajak pertambahan nilai dalam menggali potensi perpajakan yang dapat direalisasikan akibat dari dampak yang dihasilkan penyelenggaraan kegiatan *Annual Meetings IMF-WB 2018 Bali*.

peningkatan kunjungan, serta investasi terkait dalam jangka panjang. Hubungan antara penyelenggaraan MICE dan dampak ekonomi yang berkaitan dengan anggaran penyelenggaraan merupakan suatu hal yang relevan karena kegiatan MICE membutuhkan fasilitas dan dukungan publik yang berkelanjutan (Jones & Li, 2015). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dampak pengeluaran pengunjung internasional sebagai sumber stimulus ekonomi dan kontribusi pada industri MICE (Hanly, 2012). Menurut Jin et al. (2013), sangat disayangkan jika transparansi dan konsistensi dalam mengukur dampak atau manfaat ekonomi penyelenggaraan MICE tidak dapat dilakukan, karena informasi tersebut diperlukan untuk membuat evaluasi kebijakan.

Penelitian dampak ekonomi dengan rincian pengeluaran berdasarkan sektor dan wilayah sulit dilakukan, akan tetapi dengan analisis *interregional input-output* (IRIO) dapat menghasilkan rincian dampak ekonomi yang lebih komprehensif (Lee et al., 2017). Model *input output* banyak digunakan oleh peneliti dan pembuat kebijakan (Arnegger & Herz, 2016; Kim & Kim, 2015) untuk mengestimasi dampak ekonomi pada level nasional. Selain itu, estimasi pengukuran dampak ekonomi pada level regional juga diperlukan untuk mengatasi kelemahan dalam kelengkapan hasil analisis wilayah maupun analisis sektor industri karena dapat mencakup keterkaitan antarwilayah dan antarsektor. Penelitian Lee et al. (2013); dan Lee et al. (2017) menggunakan model IRIO yang menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dalam menampilkan dampak ekonomi pada level regional dengan analisis antarsektor dan antarwilayah pada daerah penyelenggara dan sekitarnya. Selain itu, penelitian tersebut juga dapat dikaitkan dengan aspek ekonomi lainnya agar

menambah evaluasi berdasarkan implikasi yang terjadi.

Kegiatan MICE berskala internasional terbesar yang diselenggarakan Indonesia sebagai tuan rumah tepatnya di wilayah Bali pada tahun 2018 adalah *Annual Meetings* IMF-WB 2018. Kegiatan ini mempertemukan para gubernur bank sentral, menteri keuangan dan pembangunan, eksekutif sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk berdiskusi masalah yang menjadi perhatian global, termasuk prospek ekonomi dunia, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, dan efektivitas bantuan (*Secretariat of the Indonesia Planning Team*, 2018). Estimasi dampak ekonomi dari penyelenggaraan *Annual Meetings* IMF-WB 2018 dan memahami komponen yang menciptakan dampak ekonomi perlu dianalisis, terutama terhadap pengeluaran atau belanja yang dilakukan langsung oleh negara untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut serta pengeluaran yang dilakukan langsung oleh mereka yang mengambil bagian dalam acara tersebut di wilayah tempat kegiatan berlangsung (Lee et al., 2017).

Dampak ekonomi yang dihasilkan dari *Annual Meetings* IMF-WB tersebut juga akan memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai efek ekonomi berantai dari *shock* ekonomi yang terjadi. Menurut Lee et al. (2013), dampak ekonomi penyelenggaraan MICE baik secara langsung dan tidak langsung terhadap daerah penyelenggara dan daerah sekitarnya menjadi alasan untuk menjadikan latar belakang bagi penelitian untuk melihat lebih komprehensif kaitan antara pengeluaran pemerintah, dampak ekonomi, dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara. Penelitian terkait dampak ekonomi penyelenggaraan *Annual Meetings* IMF-WB telah dilaksanakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (2019) dengan melihat pengeluaran pengunjung. Akan tetapi penelitian tersebut tidak secara komprehensif melihat sektor ekonomi yang terdampak serta dampak ekonomi dan dampak limpahan bagi wilayah penyelenggara dan daerah sekitarnya.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengisi *gap* dengan menganalisis dampak kebijakan pengeluaran pemerintah dan *spillover effect* dalam penyelenggaraan *Annual Meetings* IMF-WB 2018 Bali bagi daerah penyelenggara dan daerah tetangga. Spesifiknya, penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan estimasi dampak ekonomi dari pengeluaran pemerintah sebagai penyelenggara dan pengeluaran pengunjung dan menganalisis dampak perubahan sektor-sektor terkait, daerah penyelenggara maupun daerah yang terkait, serta realisasi pajak pertambahan nilai (PPN).

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap sektor-sektor dengan dampak ekonomi terbesar, wilayah provinsi dengan keterkaitan dampak terbesar dan keterkaitan dampak ekonomi terhadap PPN.

STUDI LITERATUR

Teori Pembangunan Ekonomi: Pengeluaran Pemerintah

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari proses pembangunan dengan tahapan multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan dalam sosial, sikap mental, lembaga nasional, pertumbuhan ekonomi, dan penghapusan kesenjangan kemiskinan (Safitri et al., 2021). Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu peranan alokasi, distribusi, dan stabilitas. Untuk dapat melaksanakan tiga peranan ekonomi tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan nilai tambah maksimal dari setiap pengeluaran atau investasi yang dilakukan. Hubungan antara peran pemerintah melalui pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian dikemukakan oleh Keynes, yang umum disebut sebagai teori Keynes. Teori tersebut menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah memengaruhi perkembangan ekonomi. Keynes memandang pengeluaran pemerintah merupakan variabel eksogen dari perkembangan ekonomi. Jahan et al. (2014) berpendapat bahwa kebijakan *countercyclical* sejalan dengan *keynesianism* yang menekankan bahwa pemerintah perlu mengintervensi pasar dengan melakukan belanja untuk proyek padat karya untuk merangsang dan menstabilkan pekerjaan dalam jangka pendek ketika kondisi ekonomi sedang menurun. Hubungan kausalitas ini yang mendasari teori Keynes bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan perkembangan ekonomi (Solikin, 2018).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah karena pengeluaran pemerintah merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa untuk tujuan kebijakan tersebut (Safitri et al., 2021). Pengeluaran pemerintah memiliki dasar teori dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (EX-IM)$ yang merupakan sumber legitimasi teori Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi kenaikan atau penurunan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya (Azwar, 2016). Secara singkat, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan *output* perkapita.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat (Safitri et al., 2021). Teori Keynesian juga menyatakan bahwa pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor yang dapat dianalisis dari waktu ke waktu atau dengan perubahan-perubahan dari faktor pembentukan pendapatan nasional.

Model Keseimbangan Umum: *Input Output*

Model keseimbangan umum yang komprehensif dan aplikatif digunakan adalah keseimbangan yang diperkenalkan oleh Leontief yang dikenal dengan model *input output* (Chen et al., 2016). Model *input output* oleh Leontief yang dijelaskan oleh Dietzenbacher et al. (2013) memiliki konsep dasar dalam aplikasinya. Pertama, struktur perekonomian terdiri atas beberapa sektor yang saling berinteraksi dalam transaksi jual beli. Kedua, *output* yang dihasilkan suatu sektor dijual kepada sektor lainnya dan dikonsumsi untuk memenuhi permintaan akhir. Ketiga, *input* suatu sektor diperoleh dari sektor lain seperti rumah tangga (dalam bentuk tenaga kerja), pemerintah (pajak), penyusutan, surplus usaha dan impor dari wilayah lain. Keempat, hubungan antara *output* dan *input* bersifat linier dan jumlah total *input* dalam suatu periode analisis (satu tahun) sama dengan total *output*. Kelima, suatu sektor tersusun dari satu atau beberapa perusahaan, di mana setiap sektor hanya menghasilkan satu *output* dengan satu tingkatan teknologi.

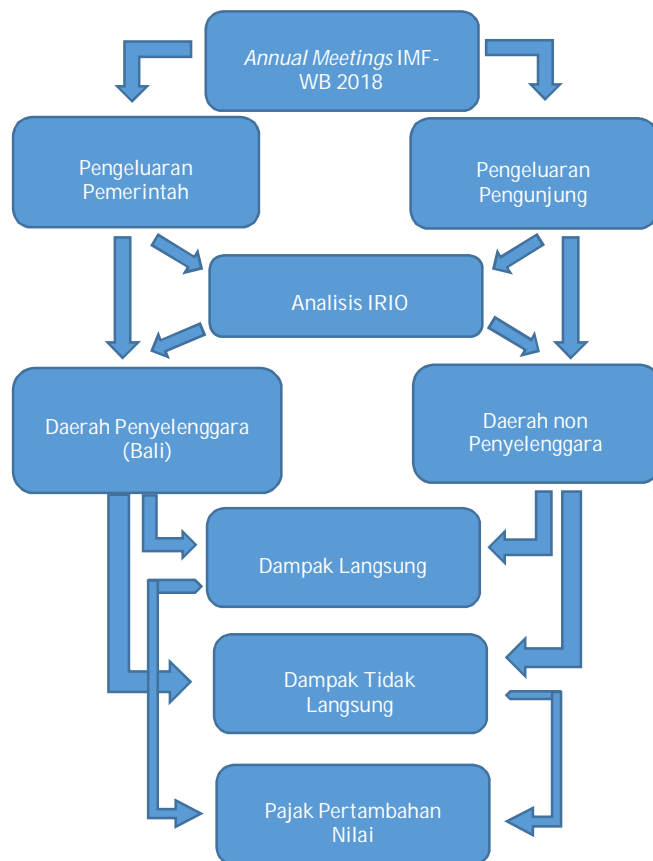
Penyusunan tabel *input output* bersifat statis dan terbuka harus memenuhi asumsi dasar yaitu: (1) Keseragaman (*homogeneity*) dimana asumsi ini menunjukkan bahwa setiap sektor ekonomi hanya memproduksi satu jenis *output* dengan struktur *input* tunggal (seragam) dan tidak ada substitusi otomatis terhadap *input* dari *output* sektor yang berbeda; 2) Kesebandingan (*proportionality*) yang mengasumsikan bahwa terdapat hubungan fungsi linier antara *input* dan *output* setiap sektor yang berarti perubahan *input* yang digunakan suatu sektor akan sebanding dengan perubahan *output* yang dihasilkan oleh sektor tersebut; dan 3) Penjumlahan (*additivity*) yang mengindikasikan bahwa total efek dari kegiatan produksi pada berbagai sektor merupakan penjumlahan dari efek kegiatan masing-masing sektor secara terpisah.

Kerangka Penelitian

Penyebaran dari dampak ekonomi ini akan dianalisis menggunakan model IRIO berdasarkan tabel *Interregional Input-Output* Nasional Tahun 2016 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021. Kerangka pemikiran penelitian menjadi dasar dalam melakukan

langkah-langkah menyelesaikan penelitian ini mengacu pada penelitian Prasetyo et al. (2021) menggunakan model *input output* untuk menghitung dampak ekonomi beserta estimasi PPN dari pengeluaran pemerintah dan pengunjung atas penyelenggaraan kegiatan yang terdapat *shock economy* di wilayah dan sektor tertentu. Kerangka pemikiran penelitian ini dituangkan dalam Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah Penulis

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder penelitian ini berupa tabel *interregional input-output* Indonesia transaksi domestik atas dasar harga produsen menurut 34 provinsi dan 17 lapangan usaha tahun 2016 yang dipublikasikan tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik (2021); data pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan *Annual Meetings* IMF-WB 2018 dari LKPP, LPSE, dan Bappenas (2018); data pengeluaran pengunjung selama penyelenggaraan *Annual Meetings* IMF-WB 2018 dari hasil survei Bappenas (2018); data-data dari hasil *literature review*, yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lainnya; data pengeluaran

pemerintah dan penyelenggara merupakan dana selama proses pelaksanaan dan pendukung pelaksanaan tahun anggaran 2018; data pengeluaran pengunjung berdasarkan *survey report* Bappenas dan LPEM FEUI dari korespondensi langsung dengan peserta kegiatan. Data yang digunakan memiliki batasan ruang lingkup yaitu pengeluaran pemerintah dan pengunjung selama periode pelaksanaan dan persiapan tahun 2018.

Model *input output* yang digunakan merupakan perhitungan matriks dan hasilnya akan membentuk koefisien *Leontief*. Dalam bentuk dasar, model ini menggambarkan distribusi produk dari berbagai industri dalam suatu ekonomi. Sektor-sektor dalam suatu ekonomi melakukan aktivitas produksi barang/jasa (*output*) maupun konsumsi barang/jasa dari sektor-sektor lain (*input*). Digambarkan bahwa suatu industri (sektor) selain berperan sebagai produsen, juga berperan sebagai konsumen bagi sektor lain. Kolom *final demand* menggambarkan permintaan akhir pasar, yang terdiri dari berbagai pihak, di antaranya konsumen akhir, baik personal maupun oleh pemerintah. Baris *value added* menggambarkan *input* dari non industri, contohnya tenaga kerja, depresiasi, dan pajak. Persamaan dasar dari analisis *input output*, adalah sebagai berikut:

$$x_i = z_{i1} + \dots + z_{ij} + \dots + z_{in} + f_i = \sum_{j=1}^n z_{ij} + f_i \quad (i)$$

Dimana x_i merupakan total *output* dari sektor i , f_i merupakan total permintaan akhir dari sektor i , sementara z_{ij} merupakan penjualan *output* sektor i kepada sektor j , atau disebut penjualan intraindustri (*interindustry sales*). Dalam suatu ekonomi terdapat banyak sektor, sehingga persamaan tersebut akan untuk masing-masing sektor, sebagaimana persamaan dibawah ini.

$$x_1 = z_{11} + \dots + z_{1j} + \dots + z_{1n} + f_1$$

$$x_i = z_{i1} + \dots + z_{ij} + \dots + z_{in} + f_i \quad (ii)$$

$$x_n = z_{n1} + \dots + z_{nj} + \dots + z_{nn} + f_n$$

Ini menunjukkan bahwa proporsi antara koefisien dari kedua sektor tersebut bersifat tetap. Berikutnya, berdasarkan pada persamaan di atas dan dengan mengelompokkan variabel x pada sisi kiri, persamaan tersebut dapat berbentuk sebagai berikut:

$$x_1 - a_{11}x_1 - \dots - a_{1i}x_i - \dots - a_{1n}x_n = f_1$$

$$x_i - a_{i1}x_1 - \dots - a_{ii}x_i - \dots - a_{in}x_n = f_i \quad (iii)$$

$$x_n - a_{n1}x_1 - \dots - a_{ni}x_i - \dots - a_{nn}x_n = f_n$$

Pengelompokkan lebih lanjut, terhadap variabel x , menghasilkan persamaan:

$$(1 - a_{11})x_1 - \dots - a_{1i}x_i - \dots - a_{1n}x_n = f_1$$

$$a_{i1}x_1 - \dots + (1 - a_{ii})x_i - \dots - a_{in}x_n = f_i \quad (iv)$$

$$-a_{n1}x_1 - \dots - a_{ni}x_i - \dots + (1 - a_{nn})x_n = f_n$$

Dalam bentuk matriks, dengan I sebagai matriks identitas berikut:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (v)$$

Kemudian, matriks I dikurangi dengan matriks A berikut:

$$I - A = \begin{bmatrix} (1 - a_{11}) & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & (1 - a_{22}) & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & (1 - a_{nn}) \end{bmatrix} \quad (vi)$$

Dalam bentuk matriks, matriks koefisien teknis suatu sektor adalah sebagai berikut:

$$(1 - A)x = f \quad (vii)$$

Apabila diinvers, maka persamaan tersebut menjadi:

$$x = (1 - A)^{-1}f = Lf \quad (viii)$$

dimana $(1 - A)^{-1} = L = (l_{ij})$ atau disebut sebagai *Leontief inverse*. Kita dapat memperoleh *output multiplier* $m(o)_j = \sum_{j=1}^n 1l_{ij}$. Indikator ini menjelaskan dampak langsung dan tidak langsung dari variasi permintaan final sektor tertentu dapat berdampak ekonomi secara keseluruhan. Model berdasarkan data moneter Dietzenbacher et al. (2013) direpresentasikan dalam bentuk matriks:

$$x' = i'Z + v' \quad (ix)$$

dimana

x' , i' , v' secara berurutan merupakan baris total *output*, baris satu sektor *output*, baris nilai tambah dari pengeluaran per sektor. Jika kita nyatakan x' sebagai matriks terdiagonalisasi dari total *output* dapat digantikan menjadi persamaan berikut:

$$i' = i'A + v' \quad (x)$$

Setelah mendapat perhitungan estimasi nilai dampak ekonomi langsung dan tidak langsung per sektor melalui persamaan (i) dan (ii) persamaan di atas, hasil tersebut dianalisis berdasarkan aturan perpajakan (Undang-undang PPN dan aturan turunannya) untuk menentukan sektor yang dikenakan PPN. Perhitungan estimasi PPN ini menggunakan metode yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo et al., 2021) dan hasil perhitungan estimasi PPN juga dikonfirmasi dengan salah satu peneliti BKF yang menguasai model *input output*. Dari 17 klasifikasi sektor pada tabel *input output* terdapat sembilan sektor yang dikenakan PPN. Kita dapat mengambil nilai dampak ekonomi dari sembilan sektor tersebut sebagai nilai yang sudah termasuk

PPN di dalamnya. Jadi untuk menghitung PPN dengan persamaan:

$$\text{Estimasi PPN} = \frac{10\%}{110\%} \times i \quad (\text{xi})$$

Hasil perhitungan estimasi PPN tersebut merepresentasikan nilai PPN yang dapat terealisasi dari dampak ekonomi penyelenggaraan kegiatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Struktur Ekonomi Regional

Salah satu *output* pada penelitian ini adalah analisis struktur *input* dan *output* antara. *Input* suatu sektor x menggambarkan komposisi *output* dari sektor-sektor lain selain sektor x tersebut yang dibutuhkan oleh sektor x untuk menghasilkan nilai *output*. Perubahan atas total *output* sektor x akan memengaruhi total permintaan atas *output* dari sektor lain yang digunakan sebagai *input* sektor x . Jadi, struktur *input* antara merupakan suatu analisis terhadap sisi permintaan dan memiliki keterkaitan dengan struktur lain ataupun berantai ke belakang. Analisis struktur *input* antara digunakan untuk mengetahui sensitivitas suatu sektor terhadap perubahan nilai pada sektor-sektor lainnya. Dengan matriks pada tabel *input output* Indonesia, analisis struktur *input* dan *output* antara juga dirincikan dalam klasifikasi wilayah. Jadi, analisis model IRIO akan menginterpretasikan keterkaitan suatu sektor maupun ketergantungan suatu wilayah dengan suatu sektor lain di wilayah lainnya.

Struktur *input* dan *output* antara yang mendapat *shock economy* paling besar pada wilayah penyelenggaraan yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai sektor utama penyelenggaraan kegiatan dan sektor konstruksi yang merupakan sektor pendukung utama atas pembangunan infrastruktur pelaksanaan kegiatan *Annual Meetings* IMF-WB 2018 Bali. Struktur *input* antara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan total Rp31,1 triliun terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Bali senilai Rp5,3 triliun atau 17%, sektor industri pengolahan Jawa Timur senilai Rp5 triliun atau 16%, dan Bali senilai Rp2,8 triliun atau 9% serta total persentase sektor di wilayah Bali yang dominan. Struktur *input* antara sektor konstruksi dengan total Rp25,4 triliun terdiri dari sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, pertambangan dan penggalian yang seluruhnya dari wilayah Bali dengan nilai Rp3,2 triliun, Rp2,5 triliun, Rp1,9 triliun dengan persentase 12%, 10%, 7% secara berurutan dari total *input* Bali. Hasil ini menunjukkan struktur *input* antara didominasi sektor terkait di wilayah domestik Bali yang berimplikasi pada dampak ekonomi domestik yang

dihasilkan lebih besar dari pengeluaran pemerintah di daerah penyelenggara.

Struktur *output* antara menginterpretasikan *output* suatu sektor pada sektor lainnya dalam nilai keseluruhan ekonomi. Perubahan total *output* pada suatu sektor akan berdampak pada perubahan ketersediaan *input* yang dapat digunakan oleh sektor-sektor lainnya yang menjadikan *output* sektor tersebut sebagai *input* untuk sektornya. Maka dari itu, analisis *output* antara merupakan analisis atas sisi penawaran pada analisis *input output* atau lebih dikenal dengan analisis keterkaitan ke depan (Lee et al., 2017). Struktur *output* antara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan total Rp14,4 triliun terdiri dari sektor transportasi dan pergudangan senilai Rp2,4 triliun atau 17%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib senilai Rp1,4 triliun atau 10%, dan sektor jasa pendidikan senilai Rp789 miliar atau 5% terbesar di wilayah Bali serta total persentase sektor di wilayah Bali yang dominan. Struktur *output* antara sektor konstruksi dengan total Rp2,4 triliun terdiri dari sektor *real estate*, konstruksi, jasa dan keuangan yang seluruhnya dari wilayah Bali dengan nilai Rp1,1 triliun, Rp776 miliar, Rp117 miliar dengan persentase 46%, 31%, 4% dari total *output* Bali yang dominan. Berdasarkan hasil analisis struktur *input* dan *output* antara dapat diartikan bahwa perputaran ekonomi lebih besar bersumber dari Bali dan sebagian besar *output* yang dihasilkan juga digunakan sebagai *input* di wilayah domestik Bali. Struktur ini mengindikasikan bahwa jika terdapat perubahan *input* di wilayah Bali akan menimbulkan dampak lebih besar di wilayah domestik Bali. Hal ini sejalan dengan temuan Badan Pusat Statistik, (2021) yang menyatakan bahwa efek limpahan antardaerah Provinsi Bali adalah 0,3796 yang artinya dampak perubahan permintaan akhir suatu sektor di Bali terhadap *output* industri di daerah lain adalah 37,96%.

Analisis Output Multiplier

Output multiplier merupakan gambaran estimasi efek berantai dampak ekonomi dari perubahan eksogen yaitu perubahan *output* sektor, pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga karena perubahan *output* sektor, peluang kerja yang dihasilkan sebagai dampak dari perubahan *output*, nilai tambah yang dihasilkan tiap-tiap sektor akibat perubahan *output* (Faturay et al., 2017). Dengan adanya *shock* ekonomi dari belanja pemerintah dan penyelenggara serta pengeluaran pengunjung yang menghasilkan dampak ekonomi, maka penting untuk melihat nilai dari *output multiplier* wilayah dan sektor untuk analisis dampak dengan model IRIO. Perhitungan *output multiplier* yang selanjutnya dilakukan adalah menghitung *inverse* dan total nilainya menjadi *output multiplier* sektor.

Tabel 1 Nilai *Output Multiplier*

Peringkat	Sektor	<i>Output Multiplier</i>
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,992
2	Pengadaan Listrik dan Gas	2,881
3	Konstruksi	2,849
4	Transportasi dan Pergudangan	2,294
5	Industri Pengolahan	2,012

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 1 menunjukkan *output multiplier* terbesar berdasarkan sektor di wilayah Bali, yaitu sektor akomodasi dan makan minum.

Peran sektor pariwisata tercermin pada kinerja positif sektor akomodasi dan makan minum di Bali yang salah satunya dikarenakan dampak positif perhelatan pertemuan tahunan IMF-WB via peningkatan jumlah pengunjung mancanegara dan okupansi hotel berbintang (Bank Indonesia, 2019). Sektor tersebut juga menjadi sektor dengan *multiplier* terbesar berdasarkan penelitian Lee et al. (2017). Berdasarkan persamaan *output multiplier* $m(o)_j = \sum_{i=1}^n 1l_{ij}$, kita dapat memperoleh nilai *output multiplier* masing-masing sektor.

Output multiplier menunjukkan besarnya dampak yang dapat dihasilkan dari perubahan *input* pada sektor-sektor tersebut. *Output multiplier* dengan nilai lebih dari satu menunjukkan bahwa penambahan *output* pada sektor tersebut akan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar dari *input* yang dialokasikan pada sektor tersebut. Model ekonomi Keynesian juga mencakup konsep efek pengganda, *output* berubah dengan beberapa kelipatan dari kenaikan atau penurunan pengeluaran yang menyebabkan perubahan tersebut (Jahan et al., 2014). Jika pengganda tujuh sektor lebih besar dari satu, maka peningkatan Rp1 rupiah dalam pengeluaran pemerintah akan menghasilkan peningkatan *output* yang lebih besar dari Rp1 rupiah. Dengan adanya *shock* ekonomi berupa belanja pemerintah dan penyelenggara serta pengeluaran pengunjung menghasilkan dampak ekonomi dan pertumbuhan ekonomi lebih besar atau bernilai positif pada sektor tersebut. Pada penelitian ini sektor terbesar yang mendapatkan *shock* ekonomi juga memiliki nilai *output multiplier* besar yang berimplikasi efek berantai dari *input shock* ekonomi tersebut

menghasilkan dampak ekonomi dengan nilai yang lebih besar.

Analisis Dampak Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan *output multiplier* tersebut akan menghasilkan nilai dampak ekonomi langsung dan tidak langsung pada sektor-sektor yang mengalami perubahan karena *shock* ekonomi. Sejalan dengan teori Keynes, intervensi pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan MICE merupakan bentuk kebijakan *countercyclical* yang menyerap tenaga kerja secara masif ketika ekonomi Indonesia sedang menghadapi ketidakpastian global yang meningkat serta sebagai ajang untuk menunjukkan kepada dunia terkait resiliensi ekonomi Indonesia (Bank Indonesia, 2018). Dampak langsung dan tidak langsung disajikan berdasarkan jenis *shock* ekonomi yaitu 1) belanja pemerintah dan penyelenggara, 2) pengeluaran pengunjung. Ringkasan dari hasil dampak ekonomi yang dihasilkan juga ditampilkan pada wilayah penyelenggara (Bali) dan non penyelenggara. Informasi perhitungan direpresentasikan dalam bentuk matriks: $x' = i'Z + v'$ yang secara berurutan merupakan baris total *output*, baris satu sektor *output*, baris nilai tambah dari pengeluaran per sektor. Persamaan x' sebagai matriks terdiagonalisasi dari total *output* dapat digantikan menjadi persamaan $i' = i'A + v'_c$, sehingga menghasilkan dampak ekonomi langsung dan tidak langsung atas penyelenggaraan *Annual Meetings* IMF-WB 2018 dari mulai tahap persiapan hingga pelaksanaan selesai tercantum pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil interpretasi dari ringkasan dampak ekonomi penyelenggaraan *Annual Meetings* IMF-WB 2018 Bali memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai dampak langsung sekitar Rp2,93 triliun dan dampak tidak langsung senilai Rp7,84 triliun.

Tabel 2 Ringkasan Dampak Ekonomi (dalam miliar Rupiah)

<i>Input</i> Wilayah terdampak	Dampak Langsung	Dampak Tidak Langsung	Total Dampak
Total <i>input</i> Bali	2.939,9	6.753,8	9.693,7
Total <i>input</i> nonBali	0	1.087,4	1.087,4
Belanja Pemerintah Bali	1.151,5	2.420,7	3.572,2
Belanja Pemerintah nonBali	0	364,8	364,8
Pengeluaran Pengunjung Bali	1.788,4	4.333,1	6.121,5
Pengeluaran Pengunjung nonBali	0	722,6	722,6

Sumber: Diolah Penulis

Perubahan pada permintaan agregat seperti penyelenggaraan *Annual Meeting* IMF-WB baik diantisipasi ataupun tidak mempunyai dampak jangka pendek paling besar pada *output* riil dan lapangan kerja (Jahan et al., 2014) yang kemudian mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga sebagai bentuk dampak pengganda dari belanja pemerintah (Bank Indonesia, 2018). Dampak langsung atas *shock* ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan ini memberikan efek berantai sehingga dampak tidak langsung mencapai lebih dari dua kali dari dampak langsungnya. Sejalan dengan temuan pada penelitian ini, Bank Indonesia (2019) juga mengklaim bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga dan peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV dibandingkan tahun lalu salah satunya disebabkan oleh penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB. Hal tersebut sejalan dengan Kumar et al. (2014) yang menyatakan bahwa dampak ekonomi dari pengeluaran terkait MICE dapat memiliki efek ganda atau bahkan tiga kali lipat karena pengaruh tidak langsungnya terhadap ekonomi kota tuan rumah dan kota tetangga. *Shock* ekonomi yang terjadi melalui dukungan infrastruktur dengan dana besar yang dialokasikan dan dana operasional selama pelaksanaan kegiatan tahun 2018 menghasilkan dampak ekonomi sekitar 90% pada daerah penyelenggara dan 10% pada daerah non penyelenggara. Persentase tersebut menguatkan bahwa perputaran dan struktur ekonomi pada wilayah Bali lebih bergantung pada ekonomi domestik di Bali. Kebijakan alokasi anggaran dana pelaksanaan kegiatan ini juga berpengaruh besar terhadap persentase dampak pada daerah tuan rumah di Bali karena sebagian besar kegiatan berfokus dan bertempat di Bali. Kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan MICE di Bali yang dilengkapi dengan tujuan wisata dan hasil industri kerajinan berstandar internasional (Bappenas, 2015) membuat dampak ekonomi yang diterima Provinsi Bali jauh lebih besar daripada daerah non penyelenggara. Lee et al. (2017) juga menyatakan bahwa daerah penyelenggara MICE dengan akomodasi dan fasilitas yang bagus serta harga yang

kompetitif akan mendorong peningkatan dampak ekonomi yang tinggi karena dapat menyebabkan peningkatan kepuasan pengunjung, yang berkontribusi pada masa tinggal yang lebih lama, dan pengeluaran yang lebih besar.

Analisis Dampak Ekonomi dengan Pajak Pertambahan Nilai

Dampak langsung dan dampak tidak langsung yang terbagi dalam 17 klasifikasi lapangan usaha dapat menjadi data analisis PPN. Dengan sifat dan karakteristik PPN, klasifikasi lapangan usaha dapat mereferensikan nilai tersebut sebagai barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) yang memiliki unsur nilai PPN atau termasuk dalam non BKP/non JKP, PPN dibebaskan/tidak dipungut. Berdasarkan hasil referensi nilai dampak dengan analisis PPN dapat dilihat pada Tabel 3 yaitu estimasi PPN yang dapat direalisasikan di wilayah Bali (dalam juta rupiah).

Penilaian estimasi PPN pada Tabel 3. Estimasi PPN dihitung dari dampak total 9 sektor yang dikenakan PPN dikurangi penyesuaian terkait data *underground economy* sekitar 22% menurut penelitian Iskandar & Mulyawan (2017). Faktor pengurang sektoral lain terdapat pada tiga sektor yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor industri pengolahan, serta sektor transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang sebagian dapat dikenakan dan sebagian tidak dapat dikenakan karena ketentuan perpajakan berkaitan dengan subjek dan objek pajak.

Sektor pertama yaitu pengadaan listrik dan gas yang memiliki estimasi nilai PPN terbesar dampak penyelenggaraan kegiatan yang PPNnya dapat diperlakukan lain yaitu dibebaskan dari pengenaan PPN jika transaksi tersebut merupakan penyerahan listrik selain untuk perumahan dengan daya di atas 6.600watt dan gas yang bukan merupakan tabung gas yang siap dikonsumsi masyarakat tidak dikenai PPN (PMK-268/PMK.03/2015). Menurut data statistik Kementerian ESDM terdapat 8-10% listrik dan gas yang digunakan untuk industri. Sektor kedua yaitu industri

Tabel 3 Estimasi PPN yang dapat direalisasikan (dalam jutaan Rupiah)

Sektor	Total Dampak	Pengurang Sektoral	PPN
Pengadaan Listrik dan Gas	658.414	191.537	42.443
Konstruksi	571.076	114.215	41.532
Jasa Lainnya	417.088	83.417	30.333
Informasi dan Komunikasi	374.360	74.872	27.226
Jasa Perusahaan	364.516	72.903	26.510
Industri Pengolahan	552.091	311.178	21.901
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	269.968	53.993	19.634
<i>Real Estate</i>	236.712	47.342	17.215
Transportasi dan Pergudangan	383.529	251.036	12.044
Total	3.827.758	1.200.493	238.841

Sumber: Diolah Penulis

pengolahan juga memiliki keterbatasan dalam estimasi nilai PPN karena terdapat bagian nilai sektor dihasilkan oleh UMKM yang bukan merupakan subjek PPN, sehingga tidak dikenakan kewajiban pembayaran PPN. Menurut survei (Bappenas, 2015) kontribusi UMKM sektor industri pengolahan dalam penyelenggaraan kegiatan ini mencapai sekitar 40%. Sektor ketiga yaitu transportasi dan pergudangan dihitung 50% karena sektor transportasi bukan objek PPN, sedangkan jasa pergudangan merupakan objek PPN.

Model *input output* dapat memberikan hasil *over estimated* jika peningkatan pengeluaran total seluruhnya dianggap sebagai tambahan perputaran ekonomi, sedangkan sebagian peningkatan pengeluaran telah termasuk dalam model (Bess & Ambargis, 2011). Dampak ekonomi yang dihitung menggunakan model *input output* dapat menangkap seluruh perputaran ekonomi termasuk *unreported income* dalam *underground economy* dan pada level UMKM yang bukan merupakan subjek PPN sehingga tidak memiliki kewajiban pembayaran PPN. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada Tabel 3, estimasi PPN atas dampak ekonomi total sektor yang dikenakan pajak kemungkinan memiliki hasil yang *over estimated* dengan beberapa alasan tersebut. Untuk konfirmasi estimasi PPN, penelitian ini membandingkan estimasi PPN dengan realisasi kenaikan PPN selama periode penyelenggaraan pada Tabel 4 merupakan perbandingan estimasi PPN dan realisasi PPN (dalam jutaan rupiah).

Dengan belanja pemerintah (*input*) Rp1,1 triliun pada tahun 2018 menghasilkan dampak pertumbuhan ekonomi dengan total (*output*) Rp10,7 triliun pada level nasional dan Rp9,6 triliun pada level regional Bali termasuk di dalamnya merupakan hasil estimasi dampak PPN di wilayah Bali sebesar Rp238 miliar. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan dampak positif penyelenggaraan MICE yaitu setiap uang dari pengeluaran terkait MICE memulai serangkaian interaksi ekonomi yang luas yang menghasilkan pengeluaran tambahan di sektor lain dari ekonomi suatu wilayah (Kumar et al., 2014). Keberhasilan tersebut tidak lepas dari ketersediaan fasilitas pendukung akomodasi dan dukungan publik yang sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya (Jones & Li, 2015; Lee et al.,

2013, 2017). Penyelenggaraan *Annual Meetings* IMF-WB 2018 juga menghasilkan pemerataan pertumbuhan ekonomi pada wilayah dan sektor karena diselenggarakan di Bali dan sektor terdampak yang merupakan struktur wilayah sektor dengan struktur ekonomi yang dominan secara nasional. Dari seluruh hasil dan pembahasan, Indonesia berhasil menyelenggarakan *event* sebagai tuan rumah karena total *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang dialokasikan. Penyelenggaraan *event* dianggap berhasil, jika kegiatan dapat menghasilkan dampak yang lebih besar dari investasi dan pendanaan yang dialokasikan (Lee et al., 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia sebagai tuan rumah telah menyelenggarakan *Annual Meetings* IMF-WB 2018 Bali dengan kebijakan yang efektif dan efisien. Belanja pemerintah pada tahun 2018 untuk dana operasional dan dana fasilitas pendukung menjadi *shock* ekonomi dan mampu memberikan dampak ekonomi positif yaitu dampak yang dihasilkan lebih besar dari pengeluaran pemerintah Indonesia terutama daerah Bali sebagai daerah penyelenggara dan daerah dengan keterikatan ekonomi dengan wilayah Bali. Intervensi pemerintah melalui penyelenggaraan MICE tersebut ketika Indonesia dilanda ketidakpastian akibat ekonomi global menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan Teori Keynes melalui permintaan agregat yang merupakan penjumlahan pengeluaran rumah tangga, sektor swasta dan pemerintah. Sektor dengan total dampak terbesar yaitu sektor penyediaan akomodasi makan dan minum yang termasuk dalam industri hotel, restoran, fasilitas pertemuan serta sektor konstruksi dalam membangun infrastruktur penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan. Model IRIO mampu mengestimasi dampak ekonomi secara komprehensif yang terjadi mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan selesai sesuai dengan teori Keynes bahwa pengeluaran pemerintah memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Secara nasional, dampak ekonomi dari estimasi potensi penerimaan PPN juga meningkat karena adanya transaksi yang termasuk objek PPN pada

Tabel 4 Perbandingan Estimasi dan Realisasi PPN (dalam jutaan Rupiah)

Penerimaan PPN	2017	2018
Kanwil DJP Bali	2.498.361	2.724.754
Selisih kenaikan realisasi PPN 2017-2018		226.393
Estimasi PPN total dampak		
Estimasi PPN		238.841
Selisih Kenaikan Realisasi 2017- 2018 dengan estimasi PPN		
Selisih		(12.448)

Sumber: Diolah Penulis

rantai transaksi atas *shock* ekonomi penyelenggaraan kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan ini mampu memberikan dampak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produk domestik bruto, maupun penguatan APBN melalui belanja yang efektif juga menghasilkan potensi penerimaan pajak. Sedangkan, distribusi dampak terhadap regional menginterpretasikan aliran ekonomi melalui *input* dan *output* yang diberikan pada regional (Bali) lebih dominan di regional (Bali) sendiri karena wilayah geografis berupa pulau yang terpisah dari regional lain, serta keterikatan ekonomi yang dominan di dalam wilayah Bali. Dampak ekonomi regional (Bali) menunjukkan kekuatan ekonomi regional (Bali) untuk tidak bergantung kepada daerah lainnya. Di sisi lain, penyelenggaraan di wilayah Bali belum dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan untuk daerah regional lainnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan yang memberikan *shock* ekonomi untuk dapat berkoordinasi dalam penyediaan data sebagai pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan. Kegiatan dengan skala internasional dan pengunjung berpenghasilan tinggi menghasilkan dampak ekonomi berantai yang signifikan sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi positif bagi wilayah tuan rumah dan wilayah di sekitarnya. Kebijakan dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan MICE baik nasional maupun internasional perlu mempertimbangkan wilayah penyelenggara serta keterkaitan sektor dengan wilayah lainnya dan sektor-sektor yang menghasilkan efek berganda yang besar sehingga menghasilkan dampak ekonomi yang lebih maksimal. Model IRIO dapat menjadi salah satu model yang komprehensif dalam studi dampak ekonomi penyelenggaraan *event* atau peristiwa yang memiliki *shock* ekonomi di wilayah tertentu dan dalam periode tertentu.

REFERENSI

- Arnegger, J., & Herz, M. (2016). Economic and destination image impacts of mega-events in emerging tourist destinations. *Journal of Destination Marketing and Management*, 5(2), 76–85. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.11.007>
- Azwar. (2016). Peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang/jasa dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.31685/ke.k.v20i2.186>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tabel interregional input-output Indonesia tahun 2016 tahun anggaran 2021* (Direktorat Neraca Produksi (ed.)). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2018). Laporan perekonomian Indonesia 2018. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2019). Kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Bali february 2019. Bali: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.
- Bappenas. (2015). *Seri analisis pembangunan wilayah Provinsi Bali tahun 2015*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2018). Meneropong pasca *IMF-WB annual meetings 2018*: kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tahunan *IMF-WB 2018*. Jakarta: Bappenas.
- Bess, R., & Ambargis, Z. O. (2011). Input-output models for impact analysis: suggestions for practitioners using rims ii multipliers. *50th Southern Regional Science Association Conference*, 1–28.
- Chen, Q., Dietzenbacher, E., Los, B., & Yang, C. (2016). Modeling the short-run effect of fiscal stimuli on GDP: A new semi-closed input-output model. *Economic Modelling*, 58, 52–63. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.05.016>
- Dietzenbacher, E., Lenzen, M., Los, B., Guan, D., Lahr, M. L., Sancho, F., Suh, S., & Yang, C. (2013). Input-output analysis: the next 25 years. *Economic Systems Research*, 25(4), 369–389. <https://doi.org/10.1080/09535314.2013.846902>
- Faturay, F., Lenzen, M., & Nugraha, K. (2017). A new sub-national multi-region input-output database for Indonesia. *Economic Systems Research*, 29(2), 234–251. <https://doi.org/10.1080/09535314.2017.1304361>
- Hanly, P. A. (2012). Measuring the economic contribution of the international association conference market: An Irish case study. *Tourism Management*, 33(6), 1574–1582. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.12.010>
- Iskandar, A., & Mulyawan, A. W. (2017). Analisis underground economy Indonesia dan potensi penerimaan pajak (analysis of underground economy of Indonesia and tax revenue potential). *SSRN Electronic Journal*. 1(1). 60–78. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3004254>
- Jahan, S., Mahmud, A. S., & Papageorgiou, C. (2014). What is keynesian economics? *finance and*

- development*, 51(3), 53–54.
- Jin, X., Weber, K., & Bauer, T. (2013). Dimensions and perceptual differences of exhibition destination attractiveness: The case of China. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 37(4), 447–469. <https://doi.org/10.1177/1096348012436382>
- Jones, C., & Li, S. N. (2015). The economic importance of meetings and conferences: A satellite account approach. *Annals of Tourism Research*, 52, 117–133. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.03.004>
- Kim, H., & Kim, B. G. (2015). Economic impacts of the hotel industry: An input-output analysis. *Tourism Review*, 70(2), 132–149. <https://doi.org/10.1108/TR-11-2014-0056>
- Kumar, J., Hussain, K., & Ali, F. (2014). A review of cogent reflection on the economic impact assessment of conferences – MICE tourism. *SHS Web of Conferences*, 12, 1–9. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20141201006>
- Lee, C. K., Lee, M. J., & Yoon, S. H. (2013). Estimating the economic impact of convention and exhibition businesses, using a regional input-output model: A case study of the Daejeon Convention Center in South Korea. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 18(4), 330–353. <https://doi.org/10.1080/10941665.2012.658414>
- Lee, C. K., Mjelde, J. W., & Kwon, Y. J. (2017). Estimating the economic impact of a mega-event on host and neighbouring regions. *Leisure Studies*, 36(1), 138–152. <https://doi.org/10.1080/02614367.2015.1040828>
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI. (2019). *Survey on the impact of IMF-World Bank annual meetings 2018*. Jakarta: LPEM FEB UI
- Prasetyo, E., Ariutama, I. G. A., & Saputra, A. H. (2021). The impact of Asian Games 2018 on Indonesian economy. *Economics Development Analysis Journal*, 10(4), 393–402. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v10i4.44666>
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Secretariat of the Indonesia Planning Team. (2018). *Implementation report of the 2018 IMF-World Bank Group annual meetings: Bringing the world to Indonesia* (A. Budiarmo (ed.)).
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran pemerintah dan perkembangan perekonomian (hukum Wagner) di negara sedang berkembang: tinjauan sistematis. *Info Artha*, 2(1), 65–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237>
- UIA. (2019). UIA releases 60th international meetings statistics report. *Union of International Associations (UIA), Brussels, Belgium, June*. Washington: UIA